



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 465 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DATA PRIORITAS TINGKAT  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa data prioritas merupakan data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang diasepakati forum satu data Indonesia;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf d Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Data Prioritas Tingkat Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
  13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 1091);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
  22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 17);
  23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 48);
24. Peraturan.....
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021

- Nomor 153);  
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

MENETAPKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DATA PRIORITAS TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Data Prioritas Tingkat Kabupaten Sumedang, data Prioritas dengan rincian dan Produsen Data dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

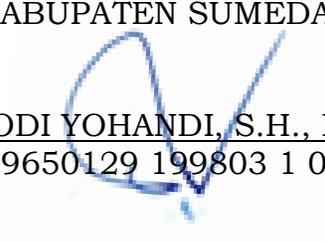
Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 465 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DATA PRIORITAS TINGKAT  
KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR DATA PRIORITAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

| No | Data Prioritas   | Produsen Data                                      |
|----|--|--|
| 1  | a. Indeks Reformasi Birokrasi;<br>b. Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik";<br>c. Nilai LPPD Kabupaten; dan<br>d. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan.  | Sekretariat Daerah Kabupaten                       |
| 2  | a. Persentase temuan penyimpangan terhadap APBD;<br>b. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP); yang diselesaikan sesuai rekomendasi; dan<br>c. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"  | Inspektorat Daerah                                 |
| 3  | a. Persentase fasilitasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan<br>b. Jumlah Anggota DPRD.   | Sekretariat DPRD                                   |
| 4  | a. Persentase siswa bersertifikat Diniyah<br>b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD<br>c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD<br>d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP<br>e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD<br>f. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP<br>g. Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket A</li> <li>• Paket B</li> <li>• Paket C</li> </ul> | Dinas Pendidikan                                   |
| 5  | a. Jumlah kematian Ibu<br>b. Jumlah kematian bayi<br>c. Persentase Balita Stunting<br>d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan<br>e. IKM Rumah Sakit   | Dinas Kesehatan                                    |
| 6  | a. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap<br>b. Rasio jaringan irigasi<br>c. Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang<br>d. Persentase tersedianya usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                |
| 7  | a. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi<br>b. Persentase Rumah Tangga berakses air minum<br>c. Rasio Rumah Layak Huni<br>d. Persentase lingkungan permukiman kumuh  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |  |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 8  | Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten sumedang (1 orang setiap RT)   | Satuan Polisi Pamong Praja   |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>b. Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkatkan Ekonomi keluarganya</li> <li>c. Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>d. Kabupaten Layak Anak</li> </ul>  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                       |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>b. Realisasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri Kabupaten Sumedang</li> <li>c. Angka partisipasi kerja peserta aspek dan sejenisnya</li> <li>d. Jumlah pekerja difabel</li> <li>e. Pekerja berdasarkan tingkat Pendidikan</li> <li>f. Upah minimum kota</li> <li>g. Jumlah phk</li> <li>h. Perselisihan hubungan industrial</li> <li>i. Jumlah peserta BPJS</li> <li>j. Pelatihan kerja</li> <li>k. Jumlah pencari kerja terdaftar, yang terpenuhi, dan penghapusan menurut jenis kelamin</li> <li>l. Jumlah pencari kerja sisa tahun lalu dan sisa akhir tahun ini</li> <li>m. Jumlah pekerja dibawah umur 18 tahun</li> <li>n. Jumlah tenaga kerja warga negara asing</li> <li>o. Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha</li> </ul> | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penanganan sampah</li> <li>b. Indeks kualitas air</li> <li>c. Indeks kualitas udara</li> <li>d. Indeks Tutupan Lahan</li> <li>e. Persentase pengurangan sampah</li> <li>f. Persentase RTH Terkelola</li> </ul>  | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan   |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan</li> <li>b. Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP</li> <li>c. Persentase bayi ber-Akte Kelahiran</li> <li>d. Persentase Data Ganda dan Anomal</li> </ul>  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Status Desa (Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang)</li> <li>b. Persentase Klasifikasi BUMdesa Maju dan Berkembang</li> <li>c. Persentase Penerapan Siskeudes kategori optima</li> </ul>  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TFR</li> <li>b. Persentase Keluarga Pra Sejahtera</li> <li>c. Persentasi Keluarga Sejahtera</li> </ul>   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</li> <li>b. Cakupan trayek angkutan umum</li> <li>c. Peningkatan Penumpang Angkutan Umum</li> <li>d. Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan</li> </ul>   | Dinas Perhubungan  |
| 16 | <p>Nilai SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan layanan komunikasi public</li> <li>b. Jumlah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</li> <li>c. Jumlah Metadata/Datashet Instansi, OPD, BUMN dan BUMD</li> <li>d. Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah (Indeks KAMI)</li> <li>e. Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM)</li> <li>f. Jumlah aduan melalui operasi lapor</li> <li>g. Daftar website dan email SKPD</li> <li>h. Daftar aplikasi dan pengelolanya</li> <li>i. Tempat jaringan free wifi area public</li> </ul> | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik           |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran</li> <li>b. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan</li> <li>c. Cakupan Koperasi Aktif</li> <li>d. Jumlah Peningkatan UMKM</li> </ul>   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| 18 | <p>Jumlah nilai investasi di Sumedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah penanam modal dalam negeri</li> <li>b. Jumlah penanam modal luar negeri</li> <li>c. Lembaga perizinan</li> <li>d. Nilai investasi perkategori perusahaan</li> <li>e. Jumlah investor</li> <li>f. Jumlah dokumen IMB yang telah terbit</li> <li>g. Daftar toko di kota Sumedang</li> <li>h. Daftar perusahaan berizin perkecamatan</li> </ul>  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kunjungan wisatawan</li> <li>b. Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan</li> <li>c. Cakupan perlindungan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan</li> <li>d. Persentasi organisasi kepemudaan yang aktif</li> <li>e. Jumlah Atlet berprestasi tingkat nasional</li> <li>f. Jumlah Kunjungan Wisatawan</li> <li>g. Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional</li> </ul>  | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga               |
| 20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Perangkat daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar</li> <li>b. Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan</li> <li>c. Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling</li> <li>d. Tingkat Kepuasan Pengunjung</li> </ul>  | Dinas Arsip dan Perpustakaan   |
| 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan)</li> <li>b. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian (Hortikultura)</li> <li>c. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian (Perkebunan)</li> <li>d. Skor Pola Pangan Harapan</li> </ul>   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                 |
|    |  |  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 22 | a. Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan<br>b. Laju Pertumbuhan Subsektor Perikanan   | Dinas Perikanan Dan Peternakan                                    |
| 23 | a. Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD<br>b. Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD<br>c. Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD<br>d. Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"<br>e. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan   | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 24 | a. Indeks Profesionalitas ASN<br>b. Indeks Sistem Merit ASN<br>c. Jumlah PNS berdasarkan eselon<br>d. Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin<br>e. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan<br>f. Jumlah ASN berdasarkan golongan<br>g. Jumlah pegawai honor<br>h. Jumlah perangkat daerah<br>i. Jumlah staff berdasarkan jenis kelamin di kantor kecamatan<br>j. Jumlah staff berdasarkan tingkat Pendidikan dan jenis kelamin di kantor kecamatan<br>k. Rekapitulasi ASN di lingkungan pemerintah daerah<br>l. Rekapitulasi ASN menurut pangkat dan Pendidikan di lingkungan pemerintah daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            |
| 25 | a. Opini BPK<br>b. APBD Tepat Waktu<br>c. Tingkat akurasi dokumen penganggaran<br>d. Ketepatan waktu proses penganggaran<br>e. Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan<br>f. Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPD dan LKOPD<br>g. Keakuratan penatausahaan asset (materealitas)  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                        |
| 26 | a. Persentase PAD terhadap pendapatan<br>b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah   | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                               |
| 27 | a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan sesuai kewenangan kelas B<br>b. IKM Rumah Sakit<br>c. Persentase Pencapaian Indikator mutu pelayanan di Rumah Saki   | Rumah Sakit Umum Daerah   |
| 28 | a. Indeks Kerukunan Umat Beragama<br>b. Index Kerukunan Umat Beragama<br>c. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif<br>d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu<br>e. Persentasi Ormas yang dibina katagori aktif  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 |
| 29 | a. Penurunan Indeks Risiko bencana<br>b. Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana<br>c. Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana<br>d. Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam<br>e. Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                               |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | f. Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Berhasil Di Realisasikan<br>g. Indeks Resiko Bencana  |   |
| 30 | Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang   | Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang              |
|    | a. Jumlah Kasus Narkoba yg ditangani BNN per Kecamatan Tahun<br>b. Jumlah Klien yg ditangani BNN Tahun<br>c. Jumlah Penerbitan SKHPN Pada Tahun<br>d. Jumlah Penyuluhan Talkshow Informasi dan Edukasi P4GN  | Badan Narkotika Nasional Sumedang                           |
| 31 | a. Jumlah tanah yang bersertifikat<br>b. Luas tanah yang bersertifikat<br>c. Bangunan atau Gudang/Gedung<br>d. Jenis hak atas tanah<br>e. Luas tanah berdasarkan hak<br>f. Sengketa tanah<br>g. Tanah kosong<br>h. Tanah ulayat<br>i. Perkara pertanahan   | Kantor Pertanahan Nasional Sumedang                         |
| 32 | a. Jumlah Pegawai dan Pengurus<br>b. Produk Perbankan<br>c. Jumlah Pegawai   | Bank Sumedang   |
| 33 | a. Jumlah pegawai dan pengurus<br>b. Produk perbangkan<br>c. Jumlah pegawai<br>d. Jumlah unit  | PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)      |
| 34 | a. Banyak pelanggan daya terpasang kwh terjual dan nilai penjualan<br>b. Tarif listrik perkwh menurut golongan tarif<br>c. Jumlah pelanggan menurut golongan tarif   | Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumedang                    |
| 35 | a. Jumlah surat pos yang diterima menurut jenis pengiriman<br>b. Jumlah desa yang terlayani pos keliling<br>c. Jumlah kantor pos<br>d. Penjualan benda pos<br>e. Jumlah pos paket yang diterima menurut jenis pengiriman<br>f. Banyaknya surat ke luar negeri melalui pos<br>g. Kiriman uang   | PT Pos Indonesia (Persero) Sumedang                         |
| 36 | a. Luas reboisasi rutin dan pembangunan menurut jenis pohon dan KPH Kabupaten Sumedang<br>b. Gangguan keamanan hutan menurut KPH dan jenis Kabupaten Sumedang<br>c. Produksi kayu bulat menurut KPH Kabupaten Sumedang<br>d. Produksi hasil hutan bukan kayu menurut KPH Kabupaten Sumedang<br>e. Produksi aneka usaha kehutanan menurut Kabupaten Sumedang<br>f. Luas kawasan hutan dan perairan Kabupaten Sumedang | Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Sumedang |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 37 | a. Jumlah pemeluk agama<br>b. Data sarana ibadah<br>c. Jumlah jama'ah haji<br>d. Jumlah penyuluh agama<br>e. Jumlah Lembaga Pendidikan keagamaan | Kantor<br>Kementerian<br>Agama<br>Kabupaten<br>Sumedang |
|----|--|---|

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001